

POLA REKRUTMEN CALON LEGISLATIF PARTAI NASIONAL DEMOKRAT PADAPEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KOTA PONTIANAK

Oleh:
ADE SETIAWAN
NIM. E02110014

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015

E-mail: setiawan_ade59@yahoo.com

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui seperti apakah pola rekrutmen yang dijalankan DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Pontianak dalam proses penetapan calon Legislatif di DPD Partai Nasdem Kota Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengkaji tentang mekanisme Pola Rekrutmen Calon Legislatif DPD Partai Nasdem di Kota Pontianak yang juga telah ditetapkan di dalam AD/ART Partai Nasdem. Adapun tahapan yang digunakan dalam proses Pola Rekrutmen Partai Nasdem DPD Kota Pontianak adalah. 1. Penjaringan Calon, dalam proses ini melihat dan menjangkir orang-orang yang dianggap berkompeten, baik itu dari Internal Partai Nasdem maupun dari Eksternal Partai. 2. Penyaringan dan Seleksi Calon, dalam proses ini calon yang sudah melalui proses penjaringan dipilih dan diseleksi mana yang layak dan berkualitas untuk melakukan ataupun masuk ke proses selanjutnya. 3. Penetapan Calon Beserta Nomor Urut, Pada proses terakhir ini semua calon yang sudah lolos proses penyaringan dan seleksi calon, diputuskan dan ditetapkan ditingkat pusat apakah bakal calon tersebut lolos atau tidaknya dan sesuai dengan AD/ART Partai Nasdem, sekaligus nomor urut peserta calon.

Kata-kata Kunci :Partai Politik, Rekrutmen, Legislatif, Pemilu

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Partai politik hadir ditengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum. Partai politik agar memperoleh eksistensi dalam sistem politik, partai politik harus bersaing dalam pemilihan umum untuk memperoleh suara dari masyarakat dan mendapat kursi di parlemen.

Rekrutmen politik atau representasi politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas rekrutmen politik. Kehadiran suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai tersebut melaksanakan fungsinya. Salah satu fungsi yang terpenting yang dimiliki partai politik adalah Fungsi Rekrutmen Politik.

Menurut Budiardjo (2003:160) Partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, tujuan dan nilai yang sama tujuan dari kelompok ini adalah merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Dalam konteks ini, menarik pendapat Firmanzah(2011:73) Menurutnya Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan sebagai pencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili. Ketika menjadi pemimpin nasional, ia otomatis menjadi pemimpin semua orang. Pemimpin ini tidak lahir dengan sendirinya, perlu proses pendidikan

Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem adalah sebuah partai politik di Indonesia yang baru diresmikan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2011, dan juga Partai ini didukung oleh Surya Paloh yang merupakan pendiri organisasi bernama sama yaitu Nasional Demokrat. Selain itu beliau mempunyai sebuah stasiun televisi yang dipimpin oleh beliau juga yakni Metro TV, yang selalu memberikan berita terbaru seputar aktivitas Partai Nasdem. Meskipun demikian, ormas tersebut mengatakan bahwa partai tersebut

tidak memiliki kaitan apapun dengan partai ini.

Pada bulan Januari 2013, KPU menetapkan 10 partai politik yang lolos tahapan verifikasi administrasi dan faktual, dan menjadikan Partai Nasdem sebagai satu-satunya partai baru yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014. Pada bulan yang sama, partai ini diramalkan oleh isu terjadinya konflik di tataran para elit partai. Ketua Majelis Tinggi Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh, kabarnya akan dicalonkan sebagai Ketua Umum Partai Nasdem pada Kongres Partai Nasdem yang akan diadakan pada 25 Januari 2013 di Jakarta. Pada bulan tersebut juga terjadi aksi pemecatan terhadap Sekjen DPW DKI Garda Pemuda Nasdem, Saiful Haq, sekaligus pembekuan kepengurusan DPW tersebut. Pada kongres perdana partai ini, yang diadakan pada Januari 2013, seluruh peserta kongres Partai Nasdem yang berasal dari seluruh Indonesia secara aklamasi sepakat mengangkat Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem yang baru, menggantikan Patrice Rio Capella.

Selain itu juga Partai NasDem sendiri mempunyai peran penting, dengan keberadaannya dan kinerja di pemerintahan Indonesia itu sendiri. Meskipun Pola Rekrutmen ini bukan merupakan

pelaksanaan dari suatu pemerintahan, namun keberadaan partai nasdem ini akan mempengaruhi bagaimana dan kearah mana pelaksanaan pemerintah berjalan kedepannya. Posisi dan peranan partai politik saat ini dalam proses interaksi yang menjembatani antara pemerintahan dan masyarakat dalam mewujudkan suatu kebijakan publik, telah menjadi identitas itu sendiri dan juga dari konvensional yang sebatas perebutan kekuasaan semata.

Kita ketahui bahwa salah satu arus utama rekrutmen adalah kaderisasi dan seleksi pemimpin dalam sistem kenegaraan yang demokratis melalui partai politik. Pola rekrutmen pemimpin memang terdapat beberapa perbedaan yang mendasar, seiring dengan berubahnya sistem politik yang dikembangkan. Tuntutan adanya suatu sistem yang demokratis menjadi faktor yang penting dan punya pengaruh besar pada era reformasi. Saat ini beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh partai politik adalah bagaimana mulai menata diri agar proses seleksi kader/pemimpin mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas.

Peran partai politik dalam merekrut anggota partai adalah sangat penting, ini sesuai dengan salah satu fungsi dari politik itu sendiri yakni rekrutmen politik. Yang dimaksud dengan rekrutmen politik adalah

partai politik berfungsi dan mencari orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik dan proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Hal ini berarti partai menjadi wadah rekrutmen politik dan sekaligus menyiapkan calon-calon pemimpin baik di level lokal maupun Nasional. Rekrutmen politik tidak saja menjamin kontinuitas dan kelestarian partai. Sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin. Orang yang ingin masuk ataupun menjadi anggotapolitik dengan cara yang instan dengan berbagai cara apapun seperti tanpa adanya proses rekrutmen yang berlaku, seperti hanya mengandalkan popularitas semata.

Dalam mendapatkan pemimpin tersebut harus dilakukan suatu proses rekrutmen. Rekrutmen merupakan sarana dari partai politik untuk mendapatkan anggota partai yang berpotensi untuk ditempatkan dalam jabatan publik. Fungsi rekrutmen menjadi sangat penting didalam partai politik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pamungkas, (2011:90) Rekrutmen politik menjadipenentu wajah partai di ruang publik. Siapa mereka, darimana asalnya, apa ideologinya, bagaimana pengalaman politiknya, dan bagaimana kapasitas politiknya akan menjadi petunjuk

awal wajah politik partai di ruang publik. Wajah partai diruang publik sangat tergantung pada bagaimana rekrutmen politik dilakukan oleh partai politik.

2. Rumusan Masalah

Memperhatikan luasnya cakupan masalah yang akan diteliti mengenai **”Rekrutmen Caleg Partai Nasional Demokrat (NasDem) Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Pontianak**” maka penulis membatasinya pada persoalan sebagai berikut; Bagaimanakah Pola Rekrutmen Partai Nasdem Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Pontianak.

3. Tujuan Penelitian

Menurut Sugiono (1999:82), Tujuan penelitian hendaknya harus dirumuskan secara spesifik dan jelas yaitu mengenai kejadian apa, dimana, bila mana terjadinya dan bagaimana. Searah dengan fokus masalah yang diteliti, maka tujuan penelitian penting untuk dirumuskan agar penelitian tetap sinkron dengan aspek yang diteliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.Untuk mengidentifikasi Rekrutmen Caleg Pada Pemilu Legislatif 2014 di DPD Partai Nasional Demokrat di

Kota Pontianak.2.Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan dalam rekrutmen Caleg di DPD Kota Pontianak.

4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 1. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan sumbangan pemikiran penulis bagi seluruh partai politik dan juga dalam upaya untuk meningkatkan kualitas rekrutmen dalam partai politik. 2. Manfaat Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh dari proses perkuliahan.

5. Tinjauan Pustaka

pengertian partai politik menurut Sigmund Neumann (dalam A. Rahman, 2007:102), Partai Politik adalah dari aktivis-aktivis partai politik yang berusaha untuk menguasai pemerintah serta untuk merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan-golongan atau golongan-golongan yang lain tapi dengan pandangan yang berbeda. Pengertian Politik

menurut Carl J. Frieddrich dalam Dody Rudianto dan Budi Sudjijono (2003:5) Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan partainya dan berdasarkan pengawasan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan pengawasan ideal maupun material”.

Adapun juga menurut UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita - cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fungsi Partai Politik menurut Prof. DR. Budi Winarno, MA (dalam A. Rahman 2007:98) Partai Politik biasanya melaksanakan empat fungsi yakni, Pertama, Sebagai sarana komunikasi politik. Kedua, sebagai sarana sosialisasi politik. Ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik. Keempat partai politik sebagai sarana pengatur politik.

Menurut Syamsuddin Haris (2005:8), Perekrutan anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting yakni mencakup :1. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat desa/kelurahan atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang. 2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elite tingkat kabupaten/kota atau cabang/daerah. 3. Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang/daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang/daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.”

Partai politik di Indonesia masing-masing memiliki cara sendiri untuk merekrut kader-kader dalam keanggotaan struktur partai politik. Selain itu setiap partai politik merekrut untuk dijadikan dalam keanggotaan di kursi parlemen. Parpol merekrut berdasarkan aturan-aturan yang dimiliki oleh parpol tersebut yang berkaitan dengan perekrutan, baik keanggotaan struktur harian parpol maupun keanggotaan dalam penentuan daftar calon tetap anggota legislatif. Dasar penguat dari

suatu partai politik yaitu memiliki keanggotaan yang kuat dalam hal ini dimaksudkan bahwa jumlah anggota yang dimiliki parpol semakin banyak maka dasar kekuatannya pun juga kuat. Selain itu, untuk dapat menjalankan fungsi parpol secara maksimal harus memiliki kursi di parlemen baik daerah, provinsi, maupun pusat.

Keberadaan demokrasi tanpa adanya partai politik adalah sebuah situasi kekuasaan tanpa legitimasi. Karena begitu pentingnya peran partai politik, maka sudah selayaknya jika partai politik diharapkan mampu menjamin demokratisasi yang sehat dan efektif. Pentingnya keberadaan partai politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam bentuk pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai agen di dalam rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan proses dimana individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Czudnowski (dalam Pamungkas, 2011:91), rekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai politik. Fungsi rekrutmen ini menjadi fungsi eksklusif partai politik dan tidak mungkin ditinggalkan oleh partai politik. Ia menjadi monopoli dan fungsi abadi partai politik.

Menurut Arifin Rahman

(1997:70):Rekrutmen Politik dapat diartikan sebagai perselisihan individu-individu yang berbakat untuk dapat menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan, dan menurut beliau pengrekrutan politik dianggap sebagai berhubungan dengan karier seseorang dibidang politik.

Ramlan Surbakti, (1992:188) mengemukakan bahwa rekrutmen politik adalah:“Seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.”

Fungsi ini semakin besar posisinya manakala partai politik itu merupakan partai politik tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai politik ini merupakan partai mayoritas dalm badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sisten politik demokrasi.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penentuan jenis penelitian yang akan digunakan adalah sesuai dengan masalah sifat dan tujuan penelitian. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif dalam bentuk deskriptif. Menurut Faisal (2012:12):“bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi sekarang ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dan dilaksanakan di Kota Pontianak yang beralamat Jln. Karang No. 73 Kecamatan Pontianak Tenggara, dan juga di DPD Partai NasDem Kota Pontianak jln.HM. Suwignyo, Gg. Arafah, No 88, dengan pertimbangan-pertimbangandalam pemilihan tempat tersebut adalah bahwasannya data yang diperlukan di DPW Partai NaDdem dan DPD NasDem tersebut lebih lengkap.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah Bapak Firdaus Zar'in S.Pd, M.Si selaku Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak

Periode 2014-2019 dan juga sekaligus menjadi tim yang dilibatkan dalam proses perekrutan calon anggota legislatif di Kota Pontianak dan Bapak H. Rosliyan Ramli Saleh, SE, MM yang menjabat sebagai Keanggotaan Partai Nasdem di DPW Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara penulis lakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para informan berkaitan dengan proses rekrutmen dan seleksi calon anggota legislatif baik dari orang yang dianggap penting dalam proses perekrutan calon legislatif yang dalam hal ini DPD kota Pontianak.

b. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini studi dokumentasi yang digunakan oleh peneliti adalah dokumentasi menggunakan alat seperti kamera, dan juga menggunakan henphon sebagai media untuk merekam proses wawancara.

C. Pembahasan

a. Penjaringan Calon

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NasDem Kota Pontianak menggunakan system penjaringan terbuka yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh Warga Negara untuk bersaing dalam proses pendaftaran Caleg dari Partai NasDem di Kota Pontianak. Pengumuman membuka pendaftaran caleg bagi eksternal atau yang berasal dari luar partai NasDem, yaitu yang berasal dari masyarakat yang disampaikan terbuka melalui media oleh DPD Partai NasDem Kota Pontianak.

Dalam proses Penjaringan, Partai NasDem biasanya menerapkan dua mekanisme, yakni: pertama merekrut caleg yang berasal dari internal partai. Dalam hal ini DPD NasDem Kota Pontianak mengakomodasi kepada pengurus partai untuk menjadi caleg. Kedua, merekrut caleg yang berasal dari luar partai (eksternal). dalam hal ini, DPD NasDem Kota Pontianak mengakomodasikan non kader partai untuk direkrut menjadi caleg.

Seperti juga yang diungkapkan Bapak Firdaus Zar'in S.Pd, M.Si :

“Bahwa tidak hanya orang internal partai nasdem saja, tetapi partai nasdem juga member peluang kepada orang-orang diluar partai nasdem sendiri (eksternal partai),

tetapi juga partai nasdem tentu tidak sembarang-sembarang untuk mengambil orang-orang yang ada di eksternal partai nasdem.”

Dasar penjaringan dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan yang objektif rasional, dimana setiap orang yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang caleg yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetensi untuk bertarung memperebutkan suara terbanyak dalam pemilihan umum legislatif. Sementara kesempatan untuk masuk dan dicalonkan oleh DPD Partai NasDem Kota Pontianak tidaklah sama bagi setiap orang, artinya hanya individu tertentu saja yang dapat direkrut menjadi Caleg dari Partai NasDem.

Seperti pernyataan yang diungkapkan Pak Rosliyan mengenai proses penjaringan:

“Adapun proses penjaringan yang dilakukan dengan dua model pengrekrutan legislatif, yakni proses rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal calon-calon anggota legislatif yang diambil dari pengurus-pengurus partai yang dianggap mempunyai kualitas, dan sedangkan rekrutmen Eksternal calon anggota legislatif diambil pada tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap berkopeten.”

Jadi dalam penjelasan diatas, bahwa calon-calon anggota legislatif yang diambil dari masyarakat atau model eksternal, tidak sembarangan, karena tentu saja Partai

Nasdem sendiri sudah melakukan proses sebelumnya, baik itu melihat kapasitasnya maupun kualitasnya baik itu rekam jejaknya, karena calon yang diambil adalah dari masyarakat. Selain itu juga menurut Bapak Firdaus Zar'in S.Pd, M.Si:

“Adapun penjaringan yang dilakukan ini tidak sembarang-sembarang untuk menjaring orang-orang yang akan dimasukkan didalam bursa calon-calon anggota legislatif ini, seperti contoh, penjaringan Internal, Partai Nasdem kebanyakan yang mencalonkan adalah pmpinan-pimpinan Partai Nasdem baik itu tingkat DPC, DPD, dan juga DPW dan yang biasanya berada pada jabatan pimpinan, ataupun sekretaris yang ikut dalam proses penjaringan ini. Sedangkan pada penjaringan Eksternalnya yang kebanyakan yang diambil dan dipilih oleh Partai Nasdem adalah orang-orang yang sudah dianggap berkompeten dan juga banyak dari kalangan pengusaha.”

Senada dengan pendapat di atas, Bapak Firdaus Zar'in (Ketua DPD Partai NasDem Kota Pontianak) mengungkapkan bahwa dalam hal penjaringan:

“Dalam hal penjaringan, DPD NasDem Kota membuka pendaftaran bagi caleg yang ikut serta dalam Pemilu legislatif 2014 yang diambil dari setiap Dapil. Setelah itu, setiap caleg dari Dapilnya akan diseleksi dengan syarat SDM, Jaringan yang luas di masyarakat,serta financial yang kuat. Perbandingan antara eksternal dan internal dalam hal penjaringan sangat berbeda. Partai Nasdem Kota member kuota 90% bagi Caleg yang berasal dari Internal partai, dan 10% diperuntukkan bagi caleg yang berasal dari luar partai.”

b. Penyaringan dan Seleksi Calon

Dalam proses penyaringan caleg yang dilakukan oleh Partai NasDem Kota Pontianaksudah memiliki *Standart Operasional Prosedur* (SOP) yang jelas, mulai dari tahapan penyaringan sampai syarat administrasi yang perlu dipenuhi oleh setiap bakal calon yang akan mendaftarkan diri. Selain memiliki SOP yang jelas, Partai NasDem memiliki beberapa hal prioritas dalam menentukan calon anggota DPRD di internal Partai, guna menunjang kerja baik antara DPRD dan Partai.

Menurut sumber yang peneliti dapat, bahwa sesungguhnya proses penyaringan yang dilakukan di internal Partai NasDem itu dalam rangka melahirkan Anggota-Anggota DPRD yang berkualitas agar dapat memenuhi harapan masyarakat. Namun apakah dalam proses penyaringan yang dilakukan Partai terdapat unsur asas kekerabatan dan apakah ada transaksional (*money politic*) dalam, penentuan Caleg DPRD serta adakah Caleg atau Anggota DPRD periode ini yang berasal dari luar Partai (Eksternal). Karena ini berpengaruh kepada kualitas kader yang ditempatkan di parlemen.

Pertimbangan akan keputusan terekrutnya seorang kandidat pertama-tama terletak pada tingkat elektabilitas kandidat,

sedangkan pertimbangan berikutnya adalah factor financial. Dalam Pileg, biaya politik yang berupa uang memang penting, tetapi kepastian menang adalah lebih penting. Dengan demikian, pengorbanan atas yang dikeluarkan menjadi pertimbangan rasional partai untuk merekrut orang yang potensial. Di satu sisi, kesepakatan antara Partai dan kandidat yang direkrut.

Dalam proses penyaringan berikutnya adalah seperti yang disampaikan oleh pak Rosliyan:

“Selanjutnya adalah proses penyaringan dan melakukan seleksi wawancara yang eksternal, setelah lolos barulah proses seleksi calon berlanjut ke tingkat DPD atau tingkat daerah, dan setelah itu baru proses penyeleksian dilakukan oleh tingkat DPW yakni tingkat wilayah ataupun pusat. Dan setelah proses peyeleksian yang dilakukan oleh tingkat DPW selesai barulah tingkat DPP yakni tingkat pusat. Jadi DPP Partai Nasdem tingkat pusatlah yang menentukan apakah calon ini lolos atau tidaknya pada bursa pencalonan legislatif”

Dari pernyataan diatas, proses wawancara dilakukan adalah untuk mengukur kualitas-kualitas ataupun kredibilitas yang terdapat pada para calon. dan selain itu juga yang dilibatkan. Dalam proses melakukan penjarangan ini dilakukan oleh semua unsur Partai Nasdem yakni dari tingkat DPD masuk ketingkat DPW, seperti yang diungkapkan Pak Rosliyan:

“Setelah proses penyaringan, baru dilanjutkan proses wawancara yang mana

dilakukan dari tingkat Daerah atau tingkat DPD dan selanjutnya dilakukan wawancara ditingkat wilayah ataupun DPW, diseleksi lagi, dan setelah itu baru masuk ke tingkat DPP yang menentukannya.”

Adapun selama yang dilibatkan proses penjurangan ini berlangsung, Partai Nasdem sudah menentukan tim yang berperan langsung untuk proses pengrekrutan berlangsung, seperti yang di ungkapkan oleh pak Rosliyan:

“Tim yang dibuat ditingkat cabang disebut dengan RAKERCAB (Rapat Kerja tingkat Cabang) yang dimana tim ini mewakili tingkatan kecamatan-kecamatan, dan yang tim penyeleksi ditingkat kabupaten disebut RAKERDA (Rapat Kerja tingkat Daerah) yang dimana tim ini mewakili tingkat kabupaten, dan setelah tim kedua tingkatan ini baru hasil dibawa ke tingkat RAKERWIL (Rapat Kerja Wilayah) yakni tingkat Provinsi, dalam tingkat inilah terdapat data-data mentah dari para setiap calon, dan yang berhak mencoret para calon hanya pada tingkat DPP ataupun tingkat pusat.”

Adapun dalam proses pengrekrutan berlangsung dari tingkat DPC, DPD, maupun DPW kisaran waktunya menghabiskan waktu selama 6 (enam) bulan, sebelum pemilu 2014 berlangsung seperti yang diungkapkan pak Rosliyan:

“Pada waktu proses penyeleksian ini dilakukan yang mana dilakukan pada waktu kisaran Januari 2013, hingga pertengahan tahun 2013, jadi saya menyimpulkan kisaran waktunya sekitar enam bulanan proses yang dilakukan dalam proses penjurangan dan penyeleksian ini berlangsung, bisa jadi lebih, karena kita inginkan disini adalah untuk mendapatkan hasil penjurangan yang maksimal, dan sisanya biasanya dimanfaatkan calon untuk memantapkan diri, seperti melakukan sosialisasi-sosialisasi sebelum berlangsungnya proses pemilu legislatif tersebut”

Sama halnya dengan pendapat yang diutarakan oleh Bapak Firdaus Zar'in (Ketua DPD NasDem Kota Pontianak, dalam hal penjurangan:

“Setelah penjurangan di setiap Dapil selesai, maka DPD Partai Nasdem Kota Pontianak akan mengirim nama-nama caleg ke DPW Partai Nasdem Provinsi. DPW Partai NasDem akan menyeleksi setiap caleg, meliputi administrasi yang sesuai dengan Undang-Undang. Setiap caleg yang dinyatakan lulus, maka nama-namanya akan dikirim ke DPP Partai NasDem. Perwakilan DPW akan mempresentasikan setiap caleg yang akan mengikuti Pemilu Legislatif”.

c. Penetapan Calon dan Nomor Urut

DPD Partai Nasdem kota Pontianak hanya melakukan proses penjurangan saja, dan yang memutuskan ataupun yang menetapkan calon sepenuhnya adalah di tingkat pusat yakni DPP Partai Nasdem, karena Partai Nasdem tidak sembarang-sembarang untuk memilih kader-kader yang akan bertarung pada pemilu legislatif, dan hal ini juga telah diatur didalam AD/ART

Partai Nasdem, seperti yang diungkapkan oleh Pak Rosliyan:

“Jadi DPW Partai Nasdem pontianak disini hanyalah melakukan proses penjaringan saja, dan yang menentukannya calonnya adalah ditingkat pusat atau DPP, karena ditingkat pusatlah penentuan keputusan-keputusan ditetapkan apakah calon tersebut berhak atau tidaknya untuk bertarung dibursa calon legislatif yang mewakili Partai Nasdem.”

Selain itu juga DPW Partai Nasdem kota Pontianak pada proses panjaringan berlangsung yang menentukan nomor urut setelah diputuskannya calon ditingkat pusat adalah bukan ditentukan oleh calon masing-masing, jadi penentuan nomor urut dilihat dari tingkat jabatan-jabatan yang sebelumnya ada pada para calon, seperti yang diungkapkan oleh Pak Rosliyan:

“Yang berhak menentukan Nomor Urut disini adalah Partai Nasdem sendiri, karena Partai Nasdem sendiri menentukan nomor urut pada para calon bukan dilakukan sembarang-sembarang, DPW Partai Nasdem sendiri dalam proses penentuan nomor urut Partai Nasdem dilihat dari tingkatan-tingkatan, misalnya kalau yang mencalonkan diri adalah sebagai pengurus Partai Nasdem itu sendiri, jadi dilihatnya adalah melalui tingkatan misalnya, apabila yang mencalonkan adalah Ketua DPW yakni ketua DPW Nasdem berhak mendapatkan nomor urut 1, dan sedangkan yang mencalonkan sekretaris DPW sendiri, tentu calon tersebut mendapatkan nomor 2. jadi semua ditentukan dari tingkat jabatan-jabatan yang berlaku sebelumnya di DPW Partai Nasdem.

Selain itu juga apabila calon tersebut berasal dari luar partai, proses penetapan nomor urut juga dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan, maupun yang lainnya seperti pensiunan-pensiunan, ataupun dilihat dari pandangan masyarakat terhadap orang tersebut, seperti tokoh agama, maupun tokoh Adat, seperti yang di ungkapkan oleh Pak Rosliyan:

“Apabila calon yang berasal dari luar partai politik proses penetapan nomor urutnya dilihat dari segi tingkatan pendidikan, ataupun calon merupakan tokoh agama atau masyarakat, ataupun bisa jadi sicalon dari kalangan masyarakat ini sebelumnya pernah menjadi ataupun mempunyai jabatan tinggi, seperti dari kalangan pimpinan perusahaan ternama, karena dalam penetapan nomor urut ini kami tidak semabarang-sembarang, kami menganggap penetapan nomor urut juga bagian dari proses yang sangat penting juga.”

Selama ini masyarakat beranggapan kebanyakan partai politik adalah sebagian besarnya dilakukan dengan *money politic*. *Money politic* (politik uang) merupakan uang maupun barang yang diberikan untuk menyogok atau memengaruhi keputusan masyarakat agar memilih partai atau perorangan tersebut dalam pemilu, padahal praktek *money politic* merupakan praktek yang sangat bertentangan dengan nilai demokrasi. Lemahnya Undang-Undang dalam memberikan sanksi tegas terhadap

pelaku *money politic* membuat praktek ini menjamur luas di masyarakat.

D. Kesimpulan

Pola rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Nasdem Kota Pontianak menurut peneliti disini sudah cukup dikatakan baik, karena bagi peneliti dari ketiga aspek yang dipakai didalam proses tersebut cukup untuk mengetahui, apakah orang ataupun calon tersebut layak atau tidaknya untuk ikut serta didalam proses pemilu legislatif, dan juga mengetahui sejauh mana kualitas SDM yang terdapat pada para calon tersebut.

E. Saran

Yang menjadi saran terpenting disini adalah disayangkannya dalam proses perekrutan terakhir yakni penetapan calon beserta nomor urutnya dilakukan ditingkat pusat yakni DPP Partai Nasdem, sebaiknya dilakukan ditingkat daerah masing-masing seperti dalam hal ini DPD Partai Nasdem Kota Pontianak karena yang ditakutkan ada terjadi *money politic* yang dimana proses penetapan calonnya bisa dilancarkan dengan *money politic* agar bisa lolos.

E. Daftar Pustaka

- Anton, M. Moeliono. 1993. *Tata Bahasa Indonesia Baku Indonesia*. Jakarta: Perum Balai Pustaka.
- _____. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- Firmanzah, 2011. *Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrai*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Faisal, Sanapiah. 2012. *Format - Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Moloeng, Ixey J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda.
- Pamungkas, Sigit, 2011. *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta : Institute For Democracy and Welfarisme
- Rudianto Doddy dan Sudjijono Budi. 2003. *Manajemen Pemasaran Partai Politik*. PT. Citra Mandala Pratama. Jakarta.
- Rahaman, Arifin. 1997. “ *Sistem Politik Indonesia*”. Surabaya: PENERBIT SIC.
- Sugiyono. 1999. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta Bandung.
- T May dan Rudy. 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Rafika Aditama. Bandung



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ADE SETIAWAN
NIM / Periode lulus : E0210019 / 2014-2015
Fakultas/Jurusan : FISIPOL / ILMU ADMINISTRASI NEGARA
E-mail address/HP : setiawan_04059@yahoo.com / 08525201539

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul (**):

POLA REKRUITMEN CALON LEGISLATIF PARTAI NASIONAL
DEMOKRAT PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014
DI KOTA PONTIANAK

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal
[Signature]
NIP. 196911222002121002

Dibuat di : PONTIANAK
Pada tanggal: 28 Juni 2015
[Signature]
(ADE SETIAWAN)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).